

HALAMAN PERSETUJUAN

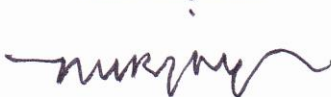
Judul Skripsi : KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN BATUAN
TANPA IZIN OLEH PENYIDIK PEJABAT
POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(Studi Di Kepolisian Resort Mojokerto)

Identitas Penulis :
Nama : Sabrina Helawati
NIM : 105010107111042
Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka waktu pelaksanaan penelitian : 4 bulan

Disetujui pada tanggal : 15 Januari 2014

Pembimbing Utama



Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H. M.S

NIP. 19540925 198003 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Ismail Navianto, S.H. M.H.

NIP. 19550212 198503 1 003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H. M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

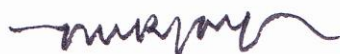
HALAMAN PENGESAHAN

KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN BATUAN TANPA IZIN OLEH PENYIDIK PEJABAT POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Di Kepolisian Resort Mojokerto)

Oleh :
SABRINA HELAWATI
105010107111042

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 4 Maret 2014

Ketua Majelis Penguji



Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H. M.S
NIP. 19540925 198003 1 002

Sekretaris Majelis Penguji



Dr. Ismail Navianto, S.H. M.H.
NIP. 19550212 198503 1 003

Anggota



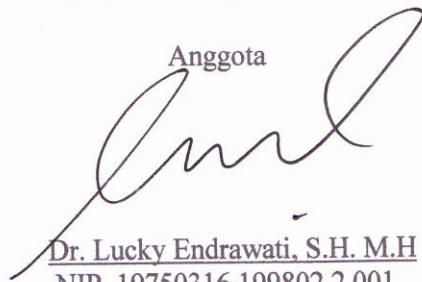
Paham Triyoso, S.H. M.Hum
NIP. 19540517 198203 1 003

Anggota



Ardi Ferdian, S.H. M.Kn
NIP. 19830930 200912 1003

Anggota



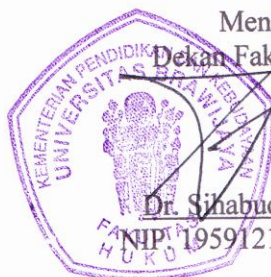
Dr. Lucky Endrawati, S.H. M.H
NIP. 19750316 199802 2 001

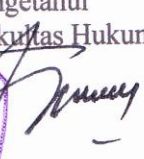
Ketua Bagian
Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H. M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Sihabudin, S.H. M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dengan judul “KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATUAN TANPA IZIN OLEH PENYIDIK PEJABAT POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Di Kepolisian Resort Mojokerto).”

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. **Yth. Bapak Dr. Sihabudin, S.H. M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
2. **Ibu Eny Harjati, S.H. M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah menyediakan waktu selama proses pengajuan judul sampai dengan selesainya pembuatan proposal skripsi.**
3. **Yth. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H. M.S selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.**
4. **Yth. Bapak Dr. Ismail Navianto, S.H. M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah menyediakan waktu,**

tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto yang sudah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian demi terselesainya skripsi ini.
6. Kedua orang tua yang tiada henti mengalirkan doa untuk anaknya yang berjuang menyelesaikan skripsi ini demi gelar S1.
7. Keluarga Griya Shanta Eksekutif P.577, The Real (Inoy, Kori, Mega) Sahabat semasa awal kuliah sampai akhir semester, dan Dian Rizka Aulia teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini, mereka semua telah menemani dan memberikan support hingga skripsi ini terselesaikan.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masukan dan kritik akan penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan.

Akhir kata penulis mohon maaf jika yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja.

Malang, 10 Desember 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Lampiran	xi
Ringkasan	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	16
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	17
2. Sistem Penegakan Hukum.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
C. Tinjauan Umum tentang Pertambangan Batuan	24
1. Pengertian Pertambangan Batuan.....	24
2. Macam-macam Komoditas Tambang	25
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pertambangan	27
1. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan	27
E. Tinjauan Umum Tentang Izin Usaha Pertambangan	31
1. Pengertian Tentang Izin.....	31
2. Pengertian Tentang Izin Usaha Pertambangan.....	33
F. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	34
1. Pengertian Penyidikan	34
2. Pengertian Penyidik.....	37
3. Tugas dan Kewenangan Penyidik	40

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	46

E. Teknik Memperoleh Data	47
F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
H. Definisi Operasional.....	50

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Mojokerto	52
B. Realita Kasus Pertambangan Batuan Tanpa Izin di Kabupaten Mojokerto.....	66
C. Kendala Penegakan Hukum yang Dihadapi Kepolisian Resort Mojokerto Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin.....	76
D. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Resort Mojokerto Untuk Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin	85

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

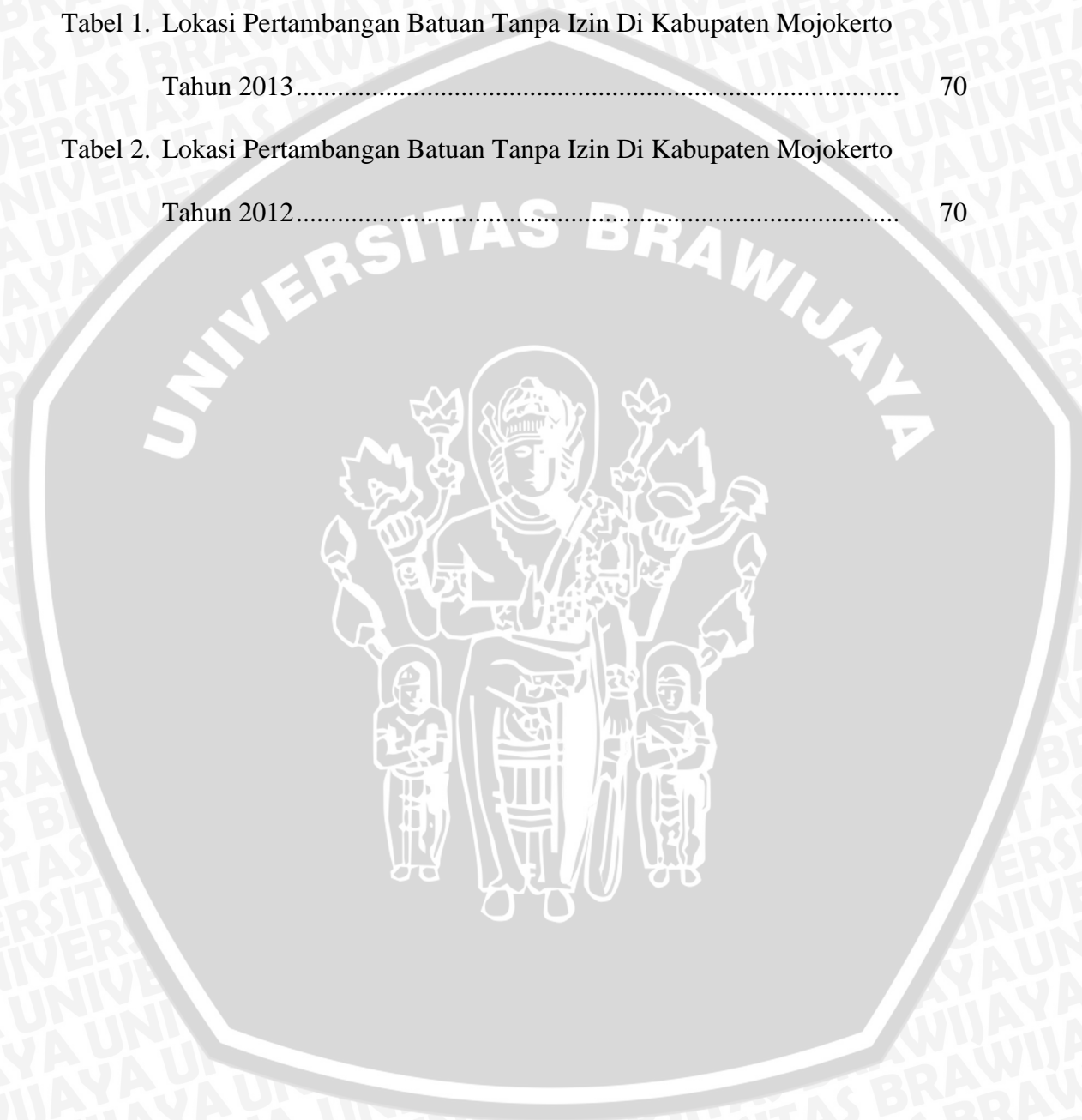
Halaman

Tabel 1. Lokasi Pertambangan Batuan Tanpa Izin Di Kabupaten Mojokerto

Tahun 2013..... 70

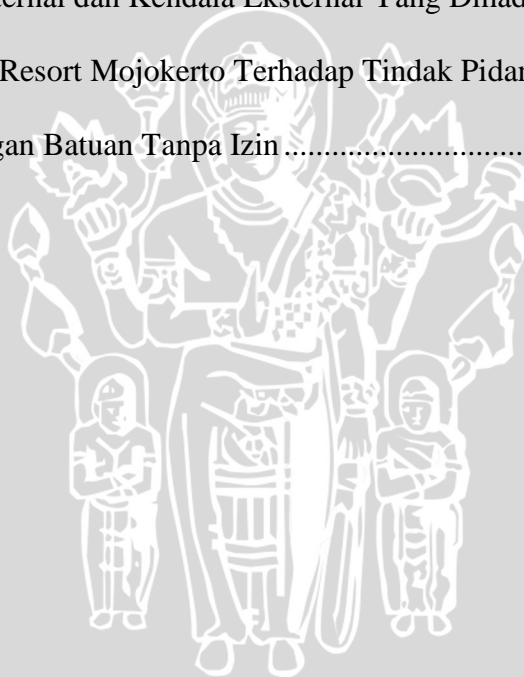
Tabel 2. Lokasi Pertambangan Batuan Tanpa Izin Di Kabupaten Mojokerto

Tahun 2012..... 70



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto	54
Gambar 2. Struktur Organisasi Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Mojokerto Oktober 2013	64
Gambar 3. Struktur Organisasi Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Mojokerto Oktober 2013	67
Gambar 4. Kendala Internal dan Kendala Eksternal Yang Dihadapi Kepolisian Resort Mojokerto Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin	84



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
SURAT-SURAT	
1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	102
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kepolisian Resort Mojokerto	104
3. Surat Keterangan Pengambilan Data di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto	105
4. Surat Keterangan Pengambilan Data di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto	106



RINGKASAN

Sabrina Helawati, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2014, KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATUAN TANPA IZIN OLEH PENYIDIK PEJABAT POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Di Kepolisian Resort Mojokerto), Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MS, Dr. Ismail Navianto, SH. MH.

Pada skripsi ini, penulis membahas tentang kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin yang ada di Kabupaten Mojokerto. Hal ini dilatarbelakangi dengan maraknya kasus pertambangan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto, namun hanya sedikit yang disidik oleh pihak Kepolisian Resort Mojokerto. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tentang kendala dan upaya penegakan hukum yang dihadapi Kepolisian Resort Mojokerto terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin.

Dalam rangka mengetahui kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, melalui pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Mojokerto dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara kepada anggota penyidik dan studi pengamatan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi. Kemudian menganalisis data yang diperoleh dengan teknik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala internal yang dihadapi Kepolisian Resort Mojokerto adalah kuantitas dan kualitas personil penyidik di tiap-tiap unit yang belum memadai, khususnya di Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Mojokerto, dan koordinasi antara pihak kepolisian dengan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto yang tidak efektif. Kendala eksternal yang timbul adalah ketidakhadiran saksi yang dipanggil secara sah, keterangan saksi yang tidak jelas, dan keterangan saksi ahli yang tidak sesuai dengan pertanyaan penyidik. Upaya yang dilakukan terhadap kendala internal adalah melakukan pelatihan-pelatihan, diklat, dan evaluasi yang secara khusus dilakukan untuk mengukur kemampuan (kinerja) personil penyidik, dan menyusun strategi guna peningkatan koordinasi antar instansi penegak hukum. Upaya yang dilakukan terhadap kendala eksternal adalah melakukan Penyampaian Surat Panggilan II, menjelaskan kepada saksi tentang kewajiban saksi, menunjukkan dasar hukum tentang kewajiban saksi ahli. Saran yang diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah perlunya Satuan Reskrim mengatasi segala kendala yang ada dalam proses penyidikan pertambangan batuan tanpa izin.

SUMMARY

SABRINA HELAWATI, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, January 2014, The Law Enforcement Constraints against Illegal Rock Mining by The Investigator Police Officers of The Republic of Indonesia (Case Study in Mojokerto Police Resort), Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MS, Dr. Ismail Navianto, SH. MH.

In this paper, the writer will discuss about the law enforcement constraints against illegal rock mining criminal act. The background of this paper is because there were so many illegal rock mining in Kabupaten Mojokerto, but only a few of them had been investigated by the Mojokerto Police Resort. The objectives of this paper are simply to get to know, to have deep understanding, and to analyze the constraints and efforts of law enforcement by Mojokerto Police Resort against the illegal rock mining.

The writer used the empirical legal research method with socio-juridical approach. The primary data in this paper consists of the investigator members' interviews and study observations of *Berita Acara Pemeriksaan* (BAP). For the secondary data the writer used study documentation, then all the data will be analyzed using the qualitative description method.

Based on the research result, the internal constraints faced by the Mojokerto Police Resort are the lack of quantity and quality of investigator personnel in each unit, particularly in the Mojokerto Specific Crime Unit Police, and the lack of coordination between the police officer and *Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal* (BTPTM) in Kabupaten Mojokerto. Furthermore, the external constraints are the absence of witnesses during the trial, the unclear witnesses' testimony, and the inconsistency of expert witnesses testimony. The efforts to overcome internal constraints were specifically conducted training and evaluation to measure the investigator personnel ability and set the strategy to improve coordination between the law enforcement agencies. Besides that, the efforts made to overcome the external constraints were sent the *Penyampaian Surat Panggilan II*, explained to the witnesses their obligations, and to pointed out the legal basis of the witnesses' obligations. In the end, the writer's suggestion in this paper is for the Criminal Unit, they have to overcome all the constraints as soon as they can.